Research Article

Management of Marine and Fisheries Resources: Cipta Kerja act and Islamic Perspective

Achmad Fachruddin Syah^{1*}

¹Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura, Madura, Jawa Timur, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords

Management,
Islamic Perspective, Marine and
Fisheries Resources,
Cipta Kerja Act

*Correspondence

fachrudin@trunojoyo.ac.id

Article History

Received 10 March 2021

Accepted 25 June 2021

Published on-line 30 June 2021

ABSTRACT

The Tenaga Kerja act has been passed. One of the sectors associated with the Tenaga Kerja act is marine and fisheries sector. Therefore, it is important to understand the potential impact of the act on the maritime and fisheries sector. The purpose of this paper was to analyze the potential effect of the Tenaga Kerja act on the marine and fisheries sector. In addition, this paper also offers a new paradigm in optimal and environmentally friendly marine and fisheries resource management based on Islam. We used descriptive analysis method by comparing the Tenaga Kerja act with acts relating to the maritime and fisheries sector. In addition, to understand how Islam manages existing natural resources, the Koran and the Sunnah of the Prophet Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* were used. The results showed that the Tenaga Kerja act opens opportunities for foreigners to exploit marine and fishery resources in Indonesia waters. As a consequence, the interests of the national fishing industry are threatened. In addition, the act created a very strong centralization of authority to the Central Government and weakened the roles of the Technical Ministers and local governments. On the other hand, Islam provides solutions in optimal management of marine and fisheries resources while maintaining their sustainability. Therefore, it is very important to consider Islam in environmental management such as in the marine and fisheries sector.

1. PENDAHULUAN

Melalui Rapat paripurna, senin (5/10/2020), DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Banyak pihak yang terkejut akan cepatnya rapat paripurna ini. Hal ini karena rapat tersebut dilakukan hanya berjarak dua hari sejak pengesahan tingkat 1 pada hari Sabtu (3/10/2020). Dalam rapat tersebut, sembilan fraksi di DPR menyampaikan pandangannya. Dari sembilan fraksi yang ada, hanya 2 fraksi yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja, yaitu fraksi PKS dan Partai Demokrat. Rapat paripurna tersebut hanya dihadiri 318 dari 575 anggota dewan. Walhasil, RUU Cipta Kerja akhirnya disahkan menjadi UU, karena mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah sepakat.

RUU Cipta Kerja telah menimbulkan polemik sejak awal gagasan ini disampaikan oleh presiden. Peraturan Perundang-undangan mewajibkan masyarakat, sebagai subjek hukum, untuk dilibatkan. Namun hal itu tidak terjadi dalam penyusunan RUU ini. Sosialisasi yang rendah dan sukarnya mengakses naskah RUU ini dialami oleh banyak pihak, termasuk beberapa pihak dalam pemerintahan itu sendiri. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Republik Indonesia [UU RI] Nomor 15 (2019) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat.

Ada sekitar 1.203 pasal dari 79 UU yang terkait yang akan mengalami dampak dari disahkannya UU RI Nomor 11 (2020) tersebut. Banyak pihak yang menilai bahwa substansi dari UU tersebut bermasalah. Hal ini disebabkan karena banyak dan kompleksnya cakupan materi UU tersebut yang dibahas dengan sangat terburu-buru di tengah masa pandemic COVID-19. Berbagai kajian serta pemikiran dari ratusan akademisi, tokoh keagamaan, serta berbagai kelompok warga sipil terkait kelemahan UU Cipta Kerja tidak ditanggapi secara sepadan. Pandangan-pandangan tersebut tidak pula dijadikan pertimbangan buat memperpanjang waktu ulasan UU Cipta Kerja dalam rangka memperluas partisipasi publik.

Salah satu sektor yang diduga akan mengalami dampak dari pengesahan RUU Cipta Kerja adalah sektor kelautan dan perikanan. Perairan Indonesia memiliki 27,2% dari seluruh spesies flora dan fauna di dunia. Jenis flora dan fauna ini termasuk mamalia 12%, amfibi 23,8%, reptil 31,8%, ikan 44,7%, moluska 40%, dan rumput laut 8,6% dari semua spesies di dunia (Badan Pusat Statistik, 2017). Ada 3.476 spesies ikan yang telah diidentifikasi di Samudera Indonesia (Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional, 2014). Kekayaan sumber daya perairan tersebut menjadikan Indonesia memiliki hasil tangkapan tertinggi kedua produksi perikanan di dunia dalam perikanan laut, dan produksi perikanan tangkap tertinggi ketujuh di dunia di perairan umum (Food and Agriculture Organization [FAO], 2016). Di sisi yang lain, lautan juga menghadapi ancaman-ancaman berbahaya sebagai dampak dari perbuatan manusia. Ancaman-ancaman tersebut diantaranya yaitu pemanasan global, polusi plastik, penangkapan ikan berlebihan, pariwisata pantai yang tidak bertanggung jawab, kebocoran bahan bakar dan limbah yang dibuang di laut, pengeboran minyak dan gas yang merusak lingkungan laut, perburuan paus komersial yang berlebih, serta polusi udara dari kebisingan industri laut hingga sonar militer (National geographic Indonesia, 2019). Burke et al., (2020) melaporkan bahwa sekitar 82% terumbu karang di Indonesia terancam rusak. Hal ini disebabkan karena aktivitas penangkapan yang tidak bertanggung jawab dan tidak teratur. Selain itu rusaknya terumbu karang diperparah oleh perubahan iklim global. Selain itu, Indonesia adalah penyumbang sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Pada tahun 2010, sekitar 1,29 juta ton dari total 3,2 juta ton sampah plastik di Indonesia berakhir di laut (Jambeck et al., 2015). Pencemaran plastik tidak hanya merugikan bagi makhluk hidup di lautan, tetapi juga kita manusia yang berada di bagian atas rantai makanan. Lebih lanjut, bakau, lamun dan rawa pasang surut telah banyak menghilang akibat konversi ke budidaya udang dan minyak sawit (Richards dan Friess, 2016) pada tingkat yang mengkhawatirkan (29.040 Gg CO₂ per tahun), setara dengan 3,2 persen dari emisi tahunan Indonesia yang terkait dengan konversi hutan dan lahan gambut (Alongi et al., 2016). Semua hal di atas akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat, biota laut dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Apabila ancaman tersebut tidak ditangani secara tepat dapat mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan biota. Mengingat berartinya sektor ini bagi bangsa Indonesia baik dari sisi ekonomi, lingkungan, energi, pariwisata, dan lain-lain, maka dasar utama yang menjadi landasan harusnya adalah efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD RI 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Banyak kelompok masyarakat yang menduga UU Cipta Kerja (UU RI Nomor 11, 2020) akan mereduksi hakikat dan fungsi instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Padahal instrumen perlindungan dan pengelolaan merupakan hal yang penting bagi lingkungan hidup. Pelemahan ini dilakukan di saat dunia tengah mempromosikan investasi yang ramah dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Tidak ada satu pun negara yang mempersepsikan instrumen tersebut sebagai kendala investasi (*investment barriers*). *Ease of Doing Business* (EoDB) pun juga tidak mengaitkan *environmental safeguards* sebagai penghambat EoDB. Negara-negara besar dan *emerging countries* kini juga semakin menyadari perlunya *green investment*. Sebagai contoh, sebagai investor besar dunia, Amerika Serikat mulai memperhatikan aspek *sustainability* (keberlanjutan) dalam berinvestasi. Amerika memiliki global *sustainable assets* sebesar \$11.9 triliun, dimana 25%-nya merupakan *sustainable investing*. Selain itu, uni Eropa juga telah menyetujui paket stimulus ekonomi sebesar 750 miliar euro (\$882 miliar), yang memprioritaskan *green investment*. Tidak mau kalah, Tiongkok juga berupaya untuk meningkatkan porsi *green investment* lebih besar. Kesadaran mereka akan perlindungan lingkungan hidup di negaranya semakin meningkat. Hal ini karena banyak bukti yang menunjukkan bahwa *green spending* tidak hanya lebih baik untuk lingkungan, tetapi juga lebih baik untuk ekonomi (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020).

Melihat pentingnya sektor kelautan dan perikanan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga kondisinya saat ini maka dirasa sangat penting untuk mengetahui dampak potensial dari diberlakukannya UU Cipta Kerja terhadap sektor ini. Oleh karena itu, studi ini mempunyai tujuan untuk memahami potensial dampak diberlakukannya UU Cipta Kerja, khususnya bagi sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, studi ini juga mempunyai tujuan untuk memperkenalkan alternative pengelolaan kelautan dan perikanan berdasarkan *perspective* Islam.

2. METODE

Sebagai agama yang sempurna, Islam juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk di bidang kelautan dan perikanan. Pengelolaan itu diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Aturan-aturan ini bertebaran di banyak kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama muslim di masa lalu dan abad ini. Seseorang dapat menyatakan pendapat sebagai pandangan / dalil Islam jika dibangun dengan menggunakan metodologi yang valid (ushul fiqh) dan berdasarkan sumber aturan Islam (dalil), seperti Alquran, Sunnah Nabi Muhammad, konsensus (ijma') para sahabat (sahabat) Nabi Muhammad dan analogi Islam atau qiyas (Abdullah, 2002; Hilal, 2004; Ismal, 2011). Oleh karena itu, dalam studi ini metode analisa deskriptif dilakukan dengan membandingkan UU Cipta Kerja dengan UU yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, untuk memahami bagaimana cara Islam mengelola sumberdaya alam yang ada maka digunakanlah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Kelautan dan Perikanan Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jarak antara perbatasan timur dan barat kira-kira 6.400 km, yang melebihi jarak antara Moskow dan London di Eropa. Jarak ini sama dengan seperdelapan jarak lingkaran bumi. Jarak antara wilayah paling utara dan wilayah paling selatan kira-kira 2.500 km (Drake, 1989). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil, diantaranya pulau-pulau besar tersebut adalah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi (Celebes), Kepulauan Maluku (Maluku), dan Papua. Sebagai negara kepulauan, laut adalah penopang hidup bangsa Indonesia (Kirylych, 2013; Kementerian Kelautan Perikanan [KKP], 2019). Wilayah Indonesia terdiri dari luas daratan kurang lebih 1,92 juta km², perairan kepulauan dan laut teritorial 12 mil laut dengan luas 3,1 juta km², dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil laut seluas 2,7 juta km² (Sulistiyono and Rochwulaningsih, 2013). Indonesia juga mempunyai panjang garis pantai sebesar 95.181 km (Pregiwati, 2019). Panjang garis pantai ini merupakan terpanjang kedua di dunia. Laut di Indonesia merupakan Mega Biodiversitas Laut terbesar di dunia yang terdiri dari 555 jenis rumput laut, 950 jenis terumbu karang dengan potensi 85.000 km², potensi areal budidaya seluas 24528178 ha dan 8.500 jenis ikan. Sumberdaya ikan terdiri dari ikan pelagis, ikan demersal, ikan karang, udang, lobster dan cumi-cumi (KKP, 2011).

Sektor perikanan berperan besar dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Produksi dan konsumsi per kapita telah berkembang secara signifikan setelah tahun 1951. Dari tahun 1951 hingga saat ini, penangkapan ikan meningkat dari 324.000 metrik ton menjadi lebih dari 1 juta metrik ton per tahun. Peningkatan produksi perikanan tersebut menjadikan Indonesia sebagai produsen perikanan terbesar kedua di dunia setelah China dan pertama di antara negara-negara ASEAN (Gambar 1) (Food and

Agriculture Organization [FAO], 2014). Penangkapan ikan laut Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup besar selama 10 tahun terakhir. Produksi perikanan tangkap laut pada tahun 2014 meningkat sebesar 1,28% yaitu 5,78 juta ton. Produksi perikanan tahun 2014 mencapai 1.268.983 ton dan meningkat 14,98% selama tahun 2010–2014. Volume produksi ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi penghasil ikan terbesar kedua di dunia. Selain itu, sektor perikanan Indonesia dapat memberikan kontribusi sebesar 7% terhadap PDB nasional, lebih tinggi 3% dari kontribusi sektor pertanian (KKP, 2015). Lebih lanjut Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan total konsumsi ikan nasional pada 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 47,34 kg / kapita / tahun dan 50,69 kg / kapita / tahun. Target ikan nasional konsumsi tahun 2019 sebesar 54,49 kg / kapita / tahun. Untuk ekspor hasil perikanan, perikanan Indonesia nilai ekspor produk tahun 2017 mencapai 1078,11 ribu ton dengan nilai 4,52 miliar US \$ (KKP, 2019). Selain itu, Indonesia juga terletak di kawasan beriklim tropis yang memiliki beragam sumber daya terbarukan. Sektor kelautan juga memiliki peranan besar dalam pendapatan negara, wisata bahari, jasa bahari dan potensi besar lainnya.

Gambar 1. Sepuluh negara penghasil penangkapan ikan terbesar di dunia (FAO, 2014)

Dengan kondisi dan potensial yang dimiliki tersebut, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara maritim yang besar. Namun demikian, Rochwulaningsih et al., (2019) menilai setidaknya ada tiga faktor fundamental yang menghalangi hal tersebut terjadi diantaranya yaitu: ketidakmampuan untuk mengembangkan teknologi canggih, kegagalan untuk menciptakan integrasi ekonomi sebagai negara kepulauan, dan kegagalan mereformasi produk tradisional yang berasal dari sumber daya alam yang melimpah. Mereka juga menambahkan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia perlu mengambil setidaknya tiga langkah strategis. Pertama, Indonesia harus mampu membangun kekuatan maritim berbasis teknologi canggih yang tidak hanya berhubungan langsung dengan laut tetapi juga harus diperkuat dengan kekuatan udara yang didukung oleh satelit canggih, dan teknologi cyber. Dalam situasi masa damai, peran kapal perang tidak hanya cukup untuk kelangsungan suatu negara maritim tetapi juga diperlukan untuk melindungi jalur komunikasi inti laut guna memfasilitasi perdagangan dan kemakmuran ekonomi (Bueger, 2016). Kedua, perumusan dan implementasi integrasi ekonomi yang utuh harus dilakukan. Hanya jika hal ini telah mapan, Indonesia akan mampu membangun ekonomi nasional yang kuat dan kebal dari krisis ekonomi global yang berulang. Pemerintah harus mendorong semua elemen masyarakat untuk menciptakan produk yang dibutuhkan oleh pasar global, terlepas dari sektor kelautan dan berbasis darat. Demi keterpaduan ekonomi dan politik antara berbagai pulau dan wilayah, perlu dikembangkan lebih lanjut spesialisasi produksi oleh ekonomi lokal dan kepulauan. Ketiga, Indonesia harus mampu mengembangkan teknologi untuk mengolah bahan baku dari sumber daya alam hingga produk jadi atau minimal setengah jadi, sehingga memiliki nilai tambah ekonomis dalam perdagangan internasional. Terakhir, penting untuk diperhatikan bahwa untuk membangun negara maritim yang besar, tidak hanya cukup menggunakan sumber daya laut, tetapi juga diperlukan sosialisasi dan akulturasi sejarah dan budaya maritim melalui pendidikan, seni, sastra, dan lain sebagainya. Tanpa meletakkan fondasi bagi budaya bahari, gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang signifikan akan tetap menjadi impian.

Di sisi yang lain, berdasarkan tingkat kesehatan lautnya, Indonesia menempati peringkat ke-137 dari 221 negara (Ocean Health Index, 2019). Indonesia mendapatkan skor 65 dari 100, berada di bawah rata-rata dunia, yaitu 71. Kajian ini dilakukan dengan menilai beberapa aspek, yaitu laut sebagai sumber makanan, kesempatan untuk artisanal fishing, pemanfaatan produk kelautan lainnya bukan untuk makanan, penyimpanan karbon (carbon storage), kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, pariwisata dan rekreasi, perlindungan spesies dan wilayah tertentu, ketersediaan air bersih, dan keanekaragaman. Skor Indonesia yang masih rendah tentunya sangat disayangkan, menimbang besarnya ketergantungan Indonesia terhadap keberlanjutan ekosistem dan sumber daya kelautan. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan hasil kajian OHI terhadap Indonesia di tahun 2015, terdapat beberapa aspek yang justru mengalami penurunan di tahun 2019.

Potensi sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) sebesar 12.541.438 ton (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50, 2017). Namun demikian, beberapa komoditas perikanan di beberapa WPP NRI ada pada kategori merah (over-exploited). Artinya, jika tidak dikelola dengan baik, komoditas/spesies perikanan tertentu akan mengalami kepunahan akibat dari penangkapan yang berlebihan (Gambar 2). Selain itu, sektor perikanan Indonesia juga menghadapi masalah serius karena kurangnya pemilihan lokasi untuk budidaya keramba; zonasi, terutama zona pesisir terpadu; dan kebijakan dan peraturan manajemen. Sektor ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait tuna dan ikan ekspor lainnya yang eko-labeling dan sertifikasi skema harus diikuti untuk bersaing di pasar global (Duggan and Kochen, 2016). Namun, pemerintah Indonesia masih berorientasi pada paradigma peningkatan produksi perikanan dan pendapatan dari pada meningkatkan perikanan berkelanjutan (Williams, 2013). Selain permasalahan pada sumber daya

perikanannya, sector perikanan juga dihadapkan dengan tantangan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usahanya. KKP (2018) melaporkan bahwa terdapat 1.636 kapal berukuran di atas 30 GT melanggar wilayah tangkap ikan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaporkan bahwa terdapat sekitar 1,2 juta ton hasil tangkapan yang tidak dilaporkan oleh pelaku usaha (KKP, 2019).

Gambar 2. Status tingkat eksploitasi sumberdaya ikan di WPP RI tahun 2015 (Suman et al., 2016)

Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing adalah masalah utama dalam keamanan laut Indonesia. Pemerintah telah menenggelamkan 488 kapal penangkap ikan ilegal dan membekukan 207 izin usaha perikanan, keduanya dilakukan untuk mengirimkan sinyal kuat penegakan hukum dan menimbulkan efek jera. Kategori illegal fishing tidak hanya berlaku untuk bendera asing yang sesekali masuk ke wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tetapi juga kapal Indonesia yang melanggar aturan seperti penggunaan awak kapal asing, alat tangkap, docking, dan illegal fishing. Penangkapan ikan IUU ini merupakan ancaman nyata yang secara tidak langsung berdampak pada nelayan Indonesia. Situasi ini terbukti mengurangi jumlah nelayan yang ditangkap hingga 50% selama sepuluh tahun terakhir, dari 1,6 juta menjadi 800.000 nelayan (Syafitri, 2018; Pudjiastuti, 2018). Upaya penanggulangan IUU fishing dipimpin oleh Kementerian Perikanan Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan [PerMen-KP] Nomor 56 (2014) beserta amandemen yang mengatur tentang moratorium penangkapan ikan, sehingga mengatur jenis komoditas dan alat tangkap yang digunakan di bidang pengelolaan perikanan Indonesia (Sutardi, 2015). Namun, karena kelemahan dan kompleksitas kekuasaan, menyebabkan kepemimpinan ini lemah. Sebagai bentuk transparansi, upaya ini juga melibatkan peran serta masyarakat untuk melaporkan dan mengakses data tentang kelautan dan perikanan, termasuk menipisnya perikanan di beberapa wilayah seperti Laut Jawa akibat penangkapan ikan yang masif pada populasi ikan pelagis kecil yang telah berlaku selama 40 tahun terakhir (Heazle and Butcher, 2007).

3.2. UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja Pasal 27 Angka 10 mempertahankan Pasal 30 UU Nomor 31 (2004) tentang Perikanan. UU Nomor 45 (2009) yang membuka akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di ZEE Indonesia. Hal ini berpeluang besar terjadinya eksploitasi sumber daya ikan Indonesia secara besar-besaran oleh pihak asing. UU Cipta Kerja diduga akan membawa Indonesia kembali ke kondisi dimana eksploitasi sumber daya perikanan didominasi oleh korporasi besar bermodal asing. Kondisi seperti ini pernah terjadi pada tahun 2000-an sampai dengan 2014. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat rendah, pengawasan kepatuhan sulit dilakukan (karena sulit membedakan yang legal dan ilegal), ditemukan praktik penggandaan izin, pendapatan negara rendah karena *under-reported* dan praktik alih muat hasil tangkapan secara ilegal, serta tindak pidana lainnya marak terjadi (seperti tindak pidana perdagangan orang dan perbudakan modern). Pada akhirnya, banyak nelayan kecil yang terdesak oleh kapal-kapal ikan asing sehingga mereka kehilangan akses melaut (Gambar 3). Padahal seharusnya nelayan dan warga negara Indonesia menjadi prioritas utama dalam mendapatkan manfaat dari sumber daya perikanan di ZEE Indonesia (Pasal 33 (3) UUD 1945).

Gambar 3. Asal kapal perikanan ilegal di WPP Indonesia (Mukhtar, 2011)

Ditinjau dari perspektif hukum internasional, pembukaan akses untuk kapal ikan asing harus sesuai dengan empat syarat yang diatur dalam Pasal 62 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) (United Nations, 1989). Pasal 62 tersebut menyatakan bahwa “Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk *inter alia* pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain, ketentuan pasal 69 dan 70, kebutuhan negara berkembang di sub-region atau region itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warga negaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan”. Oleh karena itu, pembukaan akses ZEE untuk kapal ikan asing saat ini tidak sesuai dengan keempat syarat pada Pasal 62 UNCLOS tersebut. Hal ini karena Indonesia masih dihadapkan dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan ikan dengan tingkat konsumsi ikan per kapita di Indonesia yang relatif tinggi (target sebesar 54 kg/kapita di tahun 2019), *prevalensi stunting* yang masih tinggi, serta kebutuhan penyerapan tenaga kerja di sector perikanan yang semakin besar. Pembukaan akses penangkapan ikan oleh kapal asing di ZEEI juga dapat memperburuk kondisistok ikan yang berada di *status over-exploited* di beberapa WPP NRI.

UU Cipta Kerja tidak menyebutkan secara utuh mengenai persyaratan pembukaan akses terhadap stok ikan Indonesia bagi negara lain. Namun demikian, sebagai satu kerangka hukum yang utuh maka dalam implementasinya UU Cipta Kerja wajib dilaksanakan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Pengaturan pada UU tersebut adalah (a) Akses negara lain terhadap stok ikan di ZEE Indonesia hanya dapat terjadi melalui 2 (dua) hal, yaitu *traditional fishing right* serta adanya surplus *allowable catch* dan (b) Berdasarkan Pasal 62 UNCLOS, surplus *allowable catch* hanya dapat diberikan kepada negara lain jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: (i) Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk menangkap seluruh *allowable catch*; (ii) akses terhadap surplus tersebut dirumuskan dalam sebuah perjanjian; (iii) surplus ditujukan pertama-tama kepada *landlocked States* dan/atau *geographically disadvantaged States*; (iv) sebelum membuat perjanjian, Indonesia perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *all relevant factors* termasuk: a) signifikansi stok ikan yang akan dibuka aksesnya tersebut kepada perekonomian masyarakat dan kepentingan nasional lainnya, serta b) bagaimana mitigasi terhadap dampak *economic dislocation* (yaitu hilangnya lapangan pekerjaan sebagai dampak dari diberikannya akses kepada pihak lain untuk melakukan eksploitasi sumber daya) di negara yang warganya telah sejak dahulu telah memanfaatkan stok ikan tersebut.

Sampai saat ini, Indonesia belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai surplus *allowable catch*. Surplus *allowable catch* tidak dapat dihitung secara sederhana dengan formula stok ikan dikurangi tingkat produksi. Kepentingan nasional negara Indonesia wajib diikutsertakan dalam pertimbangan untuk menentukan surplus. Sebagai contoh: sampai saat ini masih banyak penduduk Indonesia yang kelaparan dan tingkat *stunting* masih tinggi. Sumber daya ikan merupakan salah satu solusi untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, meskipun dari perhitungan stok ikan dikurangi tingkat produksi terdapat selisih (surplus), selisih tersebut haruslah diperuntukkan bagi penyelesaian permasalahan kelaparan dan *stunting* dan tidak untuk diberikan kepada negara lain. Nelayan Indonesia dan penduduk Indonesia wajib menjadi prioritas dalam mendapatkan manfaat dari sumber daya perikanan di ZEE Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 (3) UUD 1945. Indonesia Ocean Justice Initiative (2020) menegaskan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan Pasal 33(3) UUD 1945, pemberian konsesi/perizinan kepada kapal ikan asing di ZEE merupakan suatu kebijakan yang sangat keliru.

Pada periode 2014-2019, akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing dan kapal buatan luar negeri tidak dibuka di WPP NRI. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan industri perikanan nasional, nelayan Indonesia, dan keberlanjutan sumberdaya ikan Indonesia. Dampak positif dari pemberlakuan kebijakan tersebut adalah WPP NRI dimanfaatkan hanya oleh kapal ikan Indonesia, adanya kenaikan potensi stok ikan, dan adanya kenaikan perolehan pendapatan negara dari pajak karena tingkat kepatuhan kapal ikan Indonesia dapat lebih dikontrol. Pemasukan pajak dari industri perikanan dapat mencapai Rp 2 triliun di tahun 2019. Saat WPP NRI dipadati oleh kapal ikan asing dan kapal buatan luar negeri, jumlah pemasukan pajak justru tidak pernah setinggi itu.

Pasal 27 angka 15 UU Cipta Kerja menghapus ketentuan pada UU Perikanan yang mengatur bahwa kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. Konsekuensinya, kesempatan kerja bagi WNI di bidang penangkapan ikan (dalam hal kapal ikan asing beroperasi di ZEEI) akan hilang. Dengan penghapusan kewajiban ini, maka dimungkinkan kapal ikan asing yang beroperasi di Indonesia menggunakan 100% ABK asing. Dalam UU Cipta Kerja, tidak ada pasal yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan ABK berkewarganegaraan Indonesia. Maka, praktik yang pernah terjadi di era tahun 2000-an sampai dengan 2014, dengan ribuan ABK asing yang bekerja di kapal kapal ikan Tiongkok, serta ABK berkebangsaan Laos, Cambodia, Myanmar dan Thailand yang bekerja di kapal ikan Thailand yang domisili perusahaannya di Indonesia, kembali akan terjadi di perairan Indonesia. Dengan demikian kesempatan kerja bagi WNI di sektor perikanan dalam negeri akan semakin sulit, sehingga mendorong tenaga kerja Indonesia bekerja sebagai pekerja migran kapal ikan asing di luar negeri yang saat ini sangat rentan menjadi korban perdagangan orang dan perbudakan modern di kapal-kapal tersebut.

PerMen KP No 30 (2016) menjelaskan bahwa Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) memiliki fungsi memberikan saran, usulan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tentang sumber daya ikan dari berbagai sumber melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best scientific evidence*). Namun demikian, dengan dihapusnya UU Cipta Kerja, khususnya pada Pasal 27 angka 2, Komnas KAJISKAN dihapus. Padahal komisi ini berfungsi sangat penting dalam menjaga integritas keilmuan agar tingkat pemanfaatan sumber daya ikan berada pada *sustainable limit* (tingkat lestari). Keberadaan komisi ini mendorong peran sains dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pentingnya peran sains dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan telah diakui dan dicantumkan dalam *Report of the United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro pada 1992 (Agenda 21)* (United Nations, 1993). Dokumen ini menjelaskan bahwa *scientific knowledge* harus digunakan untuk mendukung pemenuhan target-target pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui *scientific assessment* yang dapat mengkaji kondisi saat ini dan proyeksi masa depan untuk dijadikan sebagai pertimbangan perumusan kebijakan. Penghapusan pasal mengenai peran Komnas KAJISKAN bertentangan dengan kesepakatan global dan norma universal, sehingga dapat menghambat tercapainya target-target pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, termasuk pencapaian ‘SDG 14: Life Below Water’. Rekomendasi dari komunitas keilmuan independen ini sangat penting untuk mengendalikan kewenangan diskresi menteri.

Kementerian merupakan lembaga teknis yang memiliki bekal kemampuan dan sarana/prasarana (*well-equipped*) untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem dan sumber daya alam yang menjadi urusannya. Setiap kementerian sudah

dilengkapi dengan tenaga ahli dan tenaga teknis untuk menunjang kerjanya. Oleh karena itu, sudah tepat jika kewenangan-kewenangan yang ada dimiliki oleh Menteri Teknis. Sementara itu, UU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian bahwa kewenangan tersebut nantinya diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Menteri Teknis terkait. Sebagai contoh, kewenangan penetapan potensi perikanan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebenarnya sudah tepat dimiliki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan mendasarkan pada hasil kajian dari Komnas KAJISKAN. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja (Pasal 27 angka 2), kebijakan dapat menjadi diskresi Pemerintah Pusat yang bisa saja tidak didasarkan pada basis keilmuan (*scientific based*). Kewenangan perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan Menteri dan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan) ditarik ke Pemerintah Pusat (Pasal 18 angka 22). Akan tetapi, UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai (a) siapa di Pemerintah Pusat yang akan memegang kewenangan penerbitan izin dan (b) mekanisme/jalur koordinasi antara pemegang kewenangan izin dengan kementerian teknis untuk memastikan adanya kesinambungan fungsi kontrol dan kendali agar pemanfaatan tidak melebihi *sustainable limit*. Selain itu, Kasim et al., (2020) juga menyatakan bahwa pasal 176 angka 9 UU Cipta Kerja tidak mengimplementasikan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945, tentang pemerintah daerah.

3.3. Perspektif Islam

Seorang muslim wajib taat kepada Allah *Subhanahuwata'ala* and Muhammad Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan pemimpin yang ada. Namun ketika terjadi perselisihan, maka kita wajib untuk kembali kepada Allah dan RasulNya. Tentang hal ini Allah *Subhanahuwata'ala* telah berfirman di surah An Nisa ayat 59 yang artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya."* (QS. An-Nisa[4]: 59).

Ketaatan seorang muslim harus diwujudkan dengan terikat kepada seluruh aturan syariah Nya yaitu syariah Islam. Hal ini karena Islam merupakan agama yang sempurna. Dalam surah Al Maidah, Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman yang artinya: *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu"* (TQS Al-Maidah [5]: 65). Selain itu seorang muslim harus mengikatkan dirinya dengan syariah yang dibawa oleh nabi Muhammad Rasulullah. Terkait dengan hal ini Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman yang artinya: *"Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran), bagi dia kehidupan yang sempit, dan dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat kelak dalam keadaan buta"* (TQS Thaha[20]: 124). Di surah yang lain Allah *Subhanahuwata'ala* juga berfirman yang artinya *"Apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, terimalah (dan amalkan). Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah sangat pedih azab-Nya"* (TQS al-Hasyr [59]: 7). *Demi Tuhanmu (wahai Muhammad), pada hakikatnya mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam semua perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa berat di hati mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima keputusan itu dengan ketundukan sepenuhnya* (TQS an-Nisa [4]: 65).

Islam merupakan petunjuk bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan, baik meliputi aspek individu seperti ibadah dan moralitas, maupun sektor publik seperti masalah sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu isu publik tersebut adalah pengelolaan sumber daya alam, termasuk kelautan dan perikanan. Allah *Subhanahuwata'ala* berfirman, *"Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur"* [QT. An-Nahl (16):14].

Beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam hal pengelolaan kelautan dan perikanan dalam perspective Islam diantaranya adalah:

Sumber daya laut adalah milik bersama

Berdasarkan pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, sumber daya alam yang menguasai orang hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa sumberdaya tersebut tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh perorangan atau segelintir orang. Laut memiliki banyak fungsi, baik sebagai jalan raya, sebagai habitat bagi makhluk air, maupun sebagai sumber energi dan mineral. Oleh karena itu laut harus ditetapkan sebagai milik bersama.

Laut merupakan milik bersama. Oleh karena itu, tidak boleh ada dominasi penguasaan laut oleh segelintir orang (yang memiliki teknologi tinggi). Pada umumnya mereka yang memiliki pukat harimau, dilengkapi dengan teknologi sonar dan GPS untuk mencari ikan, ditambah dengan pabrik pengolahan ikan terapung, dapat mengeruk ikan sebanyak-banyaknya. Hal ini menyebabkan nelayan-nelayan kecil tidak kebagian apa-apa. Oleh karena itu, negara harus mengelola agar kompetisi berjalan sehat. Sebagai contoh nelayan berteknologi tinggi hanya boleh beroperasi di area yang nelayan sederhana tidak sanggup mencapainya. Namun demikian, sistem konsesi semacam ini tetap harus diawasi dengan ketat, jangan sampai merusak ekosistem dan merugikan rakyat sebagai pemilik hakiki dari area laut itu.

SDM kelautan dan perikanan yang unggul dan cerdas

Negara memberikan pendidikan atau pelatihan yang murah atau gratis bagi nelayan-nelayan kecil. Selain itu, negara dapat memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga serta mengupgrade teknologi yang dipakai. Semua hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya laut yang ada dan menghindari terjadinya *overfishing*. Apabila nelayan tangkap di suatu wilayah terlalu banyak, maka negara bisa mengkonversi mereka menjadi nelayan budidaya atau masuk ke industri pasca panen.

Tersedia teknologi kelautan dan perikanan yang modern dan ramah lingkungan

Negara mendorong penguasaan dan alih teknologi kelautan dan perikanan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan dominasi kapal-kapal asing yang berteknologi tinggi. Banyak teknologi yang memerlukan kerja keras para peneliti dan perekrut. Teknologi tersebut misalnya alat penerima citra satelit pendeteksi keberadaan ikan, rancang bangun kapal, alat navigasi, elektronika telekomunikasi, sonar, hingga pabrik pengolah ikan terapung. Mereka yang berhasil melakukan terobosan teknologi harus diberi penghargaan yang layak, agar tidak justru menjual teknologi ini ke pihak asing.

Negara menjaga agar sumber daya laut lestari berkelanjutan

Untuk wilayah yang memerlukan teknologi tinggi bermodal besar, negara melalui BUMN-nya dapat mengambil alih sehingga sumber daya laut ini dapat sepenuhnya memberikan pemasukan bagi negara untuk diberikan kepada rakyat. Untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, negara harus melakukan upaya pencegahan terjadinya pencemaran limbah yang dilakukan oleh operasi penangkapan ikan yang menggunakan bahan berbahaya (misalnya bom ikan) maupun oleh bahan pencemaran yang berasal dari darat. Selain itu, negara wajib mencegah terjadinya *illegal-fishing*, baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing yang memasuki laut tanpa izin, maupun oleh kapal-kapal berizin yang beroperasi di luar wilayah yang ditentukan. Oleh karena itu, angkatan bersenjata negara harus diperkuat agar mampu menjaga perbatasan sekaligus mendeteksi posisi tiap kapal yang berizin dan mengeceknya secara cepat dalam data base. Negaralah yang harus pro aktif berhadapan dengan korporat asing yang melakukan *illegal fishing*, pencemaran atau pelanggaran wilayah operasi, bukannya nelayan kecil yang lemah, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. KESIMPULAN

UU Cipta Kerja membuka peluang bagi pihak asing untuk mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan. Sebagai konsekuensinya industri perikanan nasional akan terancam. Selain itu, UU ini menciptakan sentralisasi kewenangan ke Pemerintah Pusat sangat kuat dan melemahkan peran Menteri Teknis dan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan alternative pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan lain, misalnya sistem pengelolaan dalam Islam, yang mampu mengelola sumberdaya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan (sustainability) sumberdaya tersebut.

Referensi

- Abdullah, M. H. (2002). Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam. Bogor, Indonesia: Pustaka Thariqul Izzah
- Alongi, D. M., Murdiyarso, D., Fourqurean, J. W., Kauffman, J. B., Hutahaean, A., Crooks, S., ... & Wagey, T. (2016). Indonesia's blue carbon: a globally significant and vulnerable sink for seagrass and mangrove carbon. *Wetlands Ecology and Management*, 24(1), 3-13.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik sumber daya laut dan pesisir 2017. Jakarta: Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159-164. <http://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Burke, L., Selig, E., & Spalding, M. (2002). Reefs at Risk in Southeast Asia. World Resources Institute. USA.
- Duggan, D. E., & Kochen, M. (2016). Small in scale but big in potential: opportunities and challenges for fisheries certification of Indonesian small-scale tuna fisheries. *Marine Policy*, 67, 30-39. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.01.008>
- Drake, C. (1989). National Integration in Indonesia: Patterns and Policies. University of Hawaii Press, Honolulu.
- FAO. (2014). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. 223 pp.
- FAO. (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture – Contributing to Food Security and Nutrition. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations).
- Heazle, M. & Butcher, J. G. (2007). Fisheries depletion and the state in Indonesia: towards a regional regulatory regime. *Marine Policy*, 31 (3), 276-286. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2006.08.006>.
- Hilal, I. (2004). Studies in Usul ul Fiqh. 3rd Edition. California, USA: Islamic Cultural Workshop.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2020). Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. Retrieved from oceanjusticeinitiative.org
- Ismail, M. (2011). Fikrul Islam, Bunga Rampai Pemikiran Islam. Bogor, Indonesia: Al-Azhar.
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., ... & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771
- Kasim, J., Sadikin, A., Pulungan, D., Rakhmatika, D., Agustiar, & Agustine, C. N. (2020). Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditinjau dari pasal 176 angka 9 uu no.11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2011). *Marine and fisheries statistics 2011*. Jakarta.
- Kementerian PPN / Bappenas. (2014). *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. Jakarta: Direktorat Kelautan dan Perikanan. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/7614/4401/4206/Strategi_Pengelolaan_Perikanan_Berkelanjutan.pdf
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2014*, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2019). *Capaian Kerja Kementerian dan Kelautan*. Jakarta.
- Kyrylych, K. (2013). Problem of uneven economic development of the world economy: essence and causes. *Intellectual Economics*, 7(3), 344-354, <https://doi.org/10.13165/IE-13-7-3-06>
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56/Permen-Kp/2014. (2014). Retrieved from <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/56-permen-kp-2014-ttg-moratorium-perizinan-usaha-perikanan-tangkap-di-wppnri.pdf>.
- Mukhtar. (2011). *Illegal Fishing di Indonesia*. Retrieved from <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>
- National geographic Indonesia. (2019). 9 Ancaman Terbesar yang Dihadapi Laut dan Isinya Akibat Ulah Manusia. Retrieved from <https://nationalgeographic.grid.id/read/131656602/9-ancaman-terbesar-yang-dihadapi-laut-dan-isinya-akibat-ulah-manusia?page=all>.
- Ocean health index. (2020). *Global Ocean Health Index scores*. Retrieved from <http://ohi-science.org/ohi-global/scores#indonesia>.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/permen-kp/2016. (2016). Retrieved from <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/30%20PERMEN-KP%202016.pdf>.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017. (2017). Retrieved from <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/50%20KEPMEN-KP%202017.pdf>
- Pudjiastuti, S. (2018). 633 Kapal Pencuri Ikan Sudah Ditangkap - Bisnis Tempo.co, Tempo. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1148755/susi-pudjiastuti-633-kapal-pencuriikan-sudah-ditangkap>, Accessed date: 15 April 2019
- Pregiwati, L. A. (2019). Siaran pers Nomor : SP204/SJ.04/VIII/2019. Retrieved from <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama>.

- Rochwulaningsih, Y., Sulistiyono, S. T., Masruroh, N. N., & Maulany, N. N. (2019). Marine policy basis of Indonesia as a maritime state: The importance of integrated economy. *Marine Policy*, 108, 103602. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103602>.
- Richards, D. R., & Friess, D. A. (2016). Rates and drivers of mangrove deforestation in Southeast Asia, 2000–2012. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(2), 344–349.
- Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., & Amri, K. (2017). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta opsi pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97. <http://doi.org/10.15578/jkpi.8.2.2016.97-100>
- Sulistiyono, S. T., & Rochwulaningsih, Y. (2013). Contest for hegemony: the dynamics of inland and maritime cultures relations in the history of Java Island, Indonesia. *Journal of Marine and Island Cultures*, 2(2), 115–127, <https://doi.org/10.1016/j.imic.2013.10.002>.
- Sutardi, D. (2015). Tak Ada Tempat Bagi Perampokan Ikan. Retrieved from <http://kkp.go.id/wpcontent/uploads/2016/07/mina-bahari-edisi-1.pdf>
- Syafitri, A. S. (2018). Melawan Illegal Fishing, Penenggelman 488 Kapal, Dan Dampak Positifnya, Kompas. Retrieved from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/16/032545926/melawan-illegal-fishing-penenggelman-488-kapal-dan-dampakpositifnya>, Accessed date: 15 April 2019
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004. (2004). Retrieved from <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/32.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. (2009). Retrieved from <https://kkp.go.id/SKPT/Talud/artikel/9826-undang-undang-republik-indonesia-nomor-45-tahun-2009-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-2004-tentang-perikanan>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2019). Retrieved from <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202019.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (2020). Retrieved from <https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Salinan-UU-Nomor-11-Tahun-2020-tentang-Cipta-Kerja.pdf>
- United Nations. (1989). Convention on the Law of the Sea. Retrieved from https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- United Nations. (1993). Report of the United Nations Conference on Environment and Development at Rio de Janeiro in 1992. Retrieved from <https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/Agenda%2021.pdf>
- Williams, M. J. (2013). Will new multilateral arrangements help Southeast Asian states solve illegal fishing? *Contemporary Southeast Asia*, 35 (2), 258. <https://doi.org/10.1355/cs35-2f>